



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU
MENURUT PANDANGAN
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NURUL NABILA
NIM. 11720425178

PROGRAM SI
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Nabila
 NIM : 11720425178
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021

Pembimbing Skripsi


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU MENURUT PANDANGAN FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NURUL NABILA**
 NIM : **11720425178**
 Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Jum'at, 06 Agustus 2021**
 Waktu : **02.00 WIB**
 Tempat : **Daring / online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Hertina, M.Pd

Penguji II
Haswir, M.Ag

(Signatures of the Exam Panel Members)



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



ABSTRAK

Nurul Nabila, (2021) : Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah

Pemerintah telah mengeluarkan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 untuk mengatasi permasalahan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru ialah banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003? dan apa kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru? serta penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru menurut fiqih siyasah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang mana berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Data primer yakni yang didapat langsung dari bapak Drs. Bustami, MM dan ibu Sulhana Lely, Amd. Keb. Data sekundernya yakni data yang diperoleh melalui dokumen, dan buku terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui wawancara dan observasi di lapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah berdasarkan nash Al-Quran, hadist, dan kaedah *fiqhiyah* untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Jadi dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diantaranya; (i) membuat program pelatihan keterampilan menjahit dan memangkas rambut untuk penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru; serta (ii) memberikan pelatihan mengoperasikan computer untuk penyandang disabilitas Kota Pekanbaru. Adapun kendala yang dihadapi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas diantaranya; (i) kurangnya kemauan dari pihak penyandang disabilitas untuk melaksanakan program; dan (ii) Dinas Sosial masih kesulitan memasarkan produk hasil pelatihan penyandang disabilitas. Tinjauan fiqih siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk meningkatkan kemampuan dari penyandang disabilitas menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan Siyasah Dusturiyah karena penguasa berusaha untuk mensejahterakan umatnya walaupun masih ada kendala.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Ilyas dan Ibunda Azimah yang membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda atas segala do'a, motivasi dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rahman Alwi, S. Ag, MA dan Bapak Irfan M. Ag selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Rahman Alwi, S. Ag, MA, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Pembimbing Konsultasi Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Keluarga tersayang penulis Adek tersayang Muhammad Nazri dan Adik Penulis Nur Amira, Cahaya Radini, dan semua keluarga yang telah memberikan bantuan materil dan memberikan semangat bagi penulis.

11. Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.

12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Masitha Nur Rohimah, Raja Ilham Nur Arif, Nahdia Dulsan, Nur Aisyah, Nina Rahma Panggabean, Rinny Nurhayati,, Robbiatul Addawiyah, Indah Nurahmi, Berry Parma, Julheri Pradana, Nurfadila, Mardiani Harahap, Khairini, Eka Kartika, Nur Haliza, dan Melda Mawarni serta orang yang selalu ada Khairul Azmi, dan sahabat yang selalu ada, Khairini, Nurfadila, Eka Kartika, Melda Mawarni, yang telah banyak memberikan dorongan dan Do'a kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, semoga skripsi ini mampu memberi sedikit manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta seluruh praktisi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Pekanbaru, Mei 2021

Penulis,

Nurul Nabila
NIM: 11720425178



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru	13
B. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	17
C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	19
D. Identitas Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru	25
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	28
1. Sejarah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	28
2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	30
3. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Menurut Ahli	37
B. Penyandang Disabilitas.....	38
C. Konsep Fiqh Siyasah Bagi Penyandang Disabilitas	41



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Upaya Dinas Sosial Dalam Menyediakan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	48
B. Kendala Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru	57
C. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

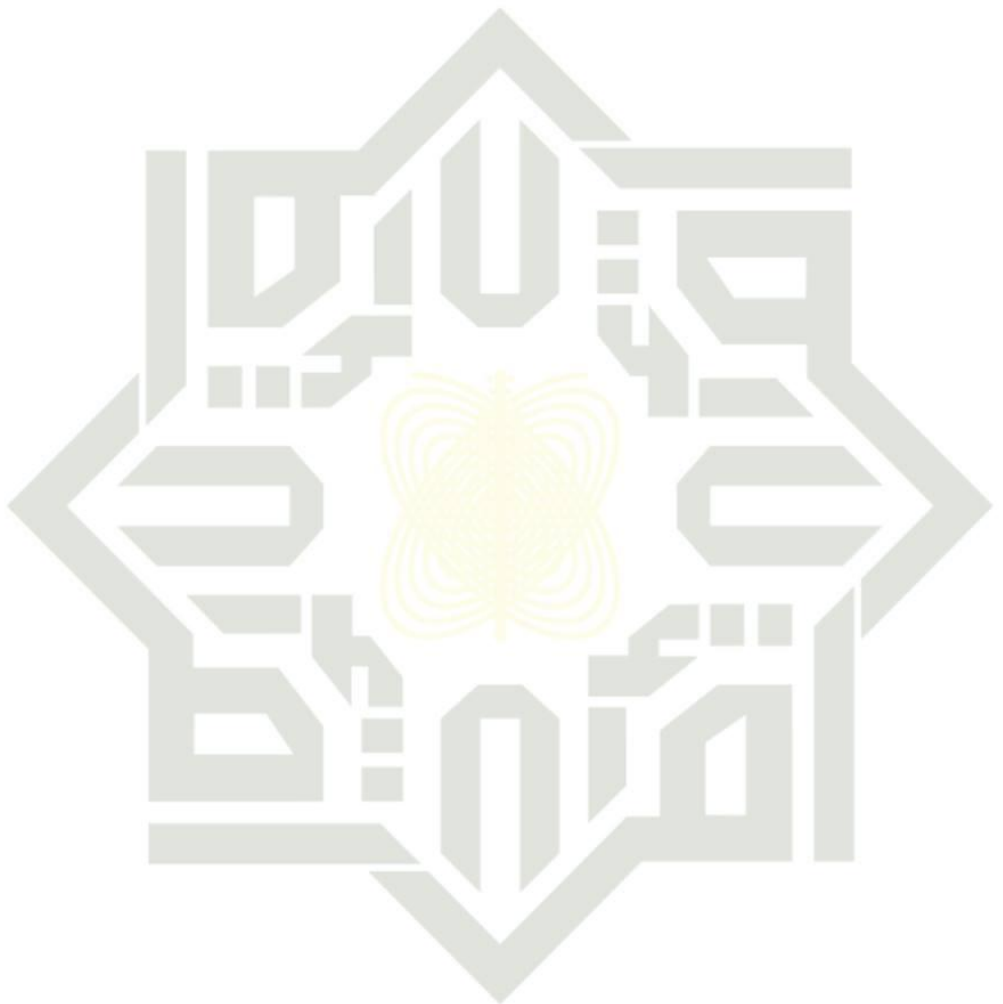
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru	26
Tabel II.2.	Data Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru	26



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas yang dibahasakan dengan istilah penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.¹

Lebih lanjut undang-undang ini menjelaskan Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.²

Dari sini dapat diketahui, bahwa maksud disabilitas adalah kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi penyandanganya untuk melakukan aktivitas sebagaimana umumnya orang.

Apabila ditinjau dari bunyi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat diketahui bahwa semua warga negara berhak mendapat pekerjaan, baik yang memiliki kekurangan (disabilitas) maupun yang tidak memiliki kekurangan. Hal tersebut berimplikasi pada

¹ Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

² <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 12 September 2020, Sabtu, Pukul 11.33 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kewajiban negara untuk memfasilitasi warganya agar memperoleh pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban warga negara tersebut.³

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.⁴

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja).
2. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.⁵

³ Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁵ Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja atau buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja atau buruh, yaitu tenaga yang sedang terikat dengan hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.⁶

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ... ﴿٦١﴾

Artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat 61).

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas.⁷

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

⁶ Rusli, H. *Hukum Ketenagakerjaan, Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan terkait Lainnya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat An-Nur ayat 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
2. Menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
3. Menyediakan waktu istirahat;
4. Menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja.
5. Memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
6. Memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.⁸

Maka dari itu, Sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas pekerjaan, penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam (I/406):

يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا مَعْنَاهُ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَعْدَارِ وَلَا عَلَى ذَوِي الْعَاهَاتِ (الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ) (حَرَجٌ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَصِحَّاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْرَهُ الْكِبْرَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ التَّوَّاضِعَ).

Artinya, “Substansi firman Allah Ta’ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para

⁸ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamba-Nya.” Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغَهَا بِذَلِكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut,’” (HR Abu Dawud).

Hadits ini memberi pemahaman bahwa dibalik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia disisi Allah ta’ala.

Permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru ialah banyak penyandang disabilitas yang sudah dibina, sudah bisa membuat keterampilan, tetapi pemasaran untuk produk-produk yang dibuat hanya ditampilkan pada bazar, sayangnya tidak masuk ke dunia industri. Lapangan kerja untuk disabilitas belum banyak. Salah satu dari binaan dinas sosial yang bernama Yandri dia memiliki bakat dalam memahami komputer, tetapi hanya perusahaan tertentu saja yang mau menerimanya. Tidak semua perusahaan bisa menerima penyandang disabilitas sebagai karyawan. Mereka sudah dilatih terampil tetapi tidak sesuai dengan lingkungan kantor atau pemerintahan. Mereka hanya dapat membuat lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri, misal buat kue, menjahit dan sebagainya. Pemerintah hanya menyediakan 2% lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas sebagai petugas pada wilayah pemerintahan.

Dinas Sosial mendata penyandang disabilitas dengan turun langsung kelapangan atau *survey* yang dilakukan oleh petugas PSM (Pekerja Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Masyarakat), yang disetiap kelurahan ditunjuk minimal 1 orang dari Dinas Sosial dengan mendata dari rumah ke rumah. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mencatat bahwa ada 81 orang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja berjumlah 15 orang dan sedangkan penyandang disabilitas yang tidak bekerja berjumlah 66 orang. Oleh karena itu berdasarkan data diatas maka sudah menjadi kewajiban Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian tentang **Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apa kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru menurut fiqh siyasah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru menurut fiqh siyasah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama yang berkaitan dengan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di kota Pekanbaru.
 - 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran Dinas Sosial memberikan hak kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru
- c. Bagi instansi / pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
- d. Secara Akademis
 - 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
 - 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).
 - 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, sedangkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis mengambil penelitian di sini karena melihat permasalahan yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan penyandang disabilitas.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas sosial di Kota Pekanbaru.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 118

¹⁰ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h 35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kesediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹¹ Penelitian ini yang menjadi populasi adalah dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu kepala bidang rehabilitasi penyandang disabilitas, kepala seksi rehabilitasi penyandang disabilitas, serta staff rehabilitasi penyandang disabilitas, dan beberapa orang masyarakat penyandang disabilitas Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹² Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu.¹³ Penelitian ini yang menjadi populasi adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data.¹⁴ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

¹¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h 122

¹² *Ibid*, h. 124

¹³ Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 188-193

¹⁴ *Ibid*. h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Dinas Sosial, dan Kelompok atau Komunitas Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan dan masalah yang diteliti. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki.
- b. Dokumentasi, yaitu pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data dan observasi dan wawancara.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta yang dianggap perlu dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data itu dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru, visi misi, dan struktur organisasi, identitas pegawai.

Bab ketiga merupakan tinjauan teoritis yang berisikan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, penyandang disabilitas dan konsep Fiqh Siyasah bagi penyandang disabilitas.

Bab keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan tentang bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2003, apa kendala penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tersebut bagi penyandang disabilitas di kota Pekanbaru, bagaimana penerapan undang-undang no 13 tahun 2003 bagi penyandang disabilitas di kota pekanbaru menurut fiqih siyasah.

Bab kelima merupakan Penutup, pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan salah satu Dinas yang ada di Kota Pekanbaru yang tugasnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial di Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja Tengkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau dengan kode pos 28128. Jam Operasi Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.¹⁵

Sejarah singkat sebelum berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dari zaman Penjajahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, tetapi bukan berarti Indonesia telah bebas seutuhnya dan merasa aman dari para penjajah Belanda. Penjajah dari Belanda ternyata tidak ingin melepaskan begitu saja jajahannya mesti Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya. Belanda mempunyai maksud untuk menjajah Indonesia kembali dengan kekuatan penuh dari pasukan tempurnya.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara kedua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan itu. Di dalam pertempuran banyak terjadi kekacauan sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh karena itu, pejuang yang berada digaris belakang mengkoordinir para relawan untuk membantu para pejuang garis depan dan pengungsi lainnya. Tugas para relawan adalah

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021*, dari <http://pekanbarukota.bps.go.id> diakses, pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 19:45 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antar para pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember dan diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari Departemen Sosial.¹⁶

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah untuk dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan. Maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950, Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1956, Jawatan Sosial ditambah tugas utamanya yaitu membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (ORSOS).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia. Untuk tingkat pusat dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil)

¹⁶ Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dari website <https://dinsos.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 Pukul 20.30 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Departemen Sosial Propinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang bertugas di kantor camat setempat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang luruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga social, organisasi social, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk) korban HIV/AIDS korban napza, komunitas adat terpecil.

Pada tahun 1998 Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan Kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas terbentuk dengan nama Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.¹⁷

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas

¹⁷ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada dibawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini di satu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat juga menantang, Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 membuat 6 (enam) tempat Pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang sekarang namanya berubah menjadi Dinas Sosial Pekanbaru.¹⁸

¹⁸ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut ;

1. Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat serta pemakaman yang bersih, tertib indah”.¹⁹

2. Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

¹⁹ Sumber dari Dinas Sosial 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
- d. Mensosialisasikan bantuan Kesejahteraan Sosial.
- e. Mengembangkan/ meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memperdayakan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.²⁰

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian urusan pemerintah daerah kota dibidang Kesejahteraan Sosial dan pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Bab V pasal 98, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Melakukan pelaksanaan pembinaan Kewenangan dibidang kesejahteraan Sosial dan Pemakaman yang ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru.

- a. Peyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru
- b. Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan Sosial.

²⁰ Sumber dari Dinas Sosial 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan
- e. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- f. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS)
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- h. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan Lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.
- i. Pengelolaan kegiatan pemakaman dan penertiban lahan-lahan pemakaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan.²¹

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai

berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris

- 1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan

²¹ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Bab 5, Pasal 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial
 - 1) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lansia
 - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - 3) Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial
- d. Bidang Rehabilitas Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitas Anak Nakal, Eks Narkoba Nafza dan Hukuman
 - 2) Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
 - 3) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana
 - 2) Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
 - 3) Seksi Pengendalian, Pegawasan, dan Pengumpulan dan Sosial

Struktur organisasi berlaku selama 7 bulan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Kemudian keliar Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan organisasi kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru oleh Walikota, struktur organisasi kebutuhan dan tugas pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas :
 - 1) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman
- 3) Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman, membina unit pelaksanaan teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- 4) Meyelenggarakan urusan penatausahaan Dinas.
- 5) Melaksanakan Tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud juga meyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan pemakaman
- 2) Peyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum
- 3) Peyusunan dan pelaporan
- 4) Peyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin, meyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan, dan program dinas.
- 2) Meyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
- 3) Mengkordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan Dinas.
- 4) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- 7) Mengkoordinasikan membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban Dinas.
- 8) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
- 9) Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi
- 10) Secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 11) Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tulisan
- 13) Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 14) Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Peyusunan program kerja dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Penyelenggaraan pelayanan admintrasi, keuangan, kepegawaian, tata peraturan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan admintrasi dinas.
- 4) Pengkoordinasi rapat dan keprotokolan.
- 5) Pengkoordinasi laporan tahunan.\
- 6) Pengkoordinasi kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang pelayanan dan Pemberdayaan sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan membina, dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan Kesejahteraan sosial dibidang Kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia,dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan Lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti spsial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial.
- 2) Mengkoordinasikan, membina,, dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pembedayaan sosial.
- 3) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan inventarisasi dan peyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya.
- 4) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyiapan dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Mengkoordinasi, membina dan menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya
- 7) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pelayanan dan pembedayaan sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga meyelenggarakan fungsi:

- 1) Peyusunan program kerja
- 2) Membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pembedayaan sosial.
- 3) Pengkoordinasian inventaris data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 4) Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai rincian tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitas sosial.
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlantar, atau anak nakal, eks korban napza, bebas hukuman dan tunasusila.

- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Kerjasama dengan unit lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
- 6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitas Sosial dan melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Peyusunan program kerja
- 2) Pembinaan lanjut, pelayanan sosial.
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

D. Identitas Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa identitas pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelaminan dan latar belakang Pendidikannya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel I.1
Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah(Orang)
1.	Laki-Laki	15
2.	Perempuan	15
Jumlah		30

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru berjumlah 30 orang yang terdiri dari perempuan sebanyak 15 orang dan laki-laki sebanyak 15 orang.

Peningkatan kinerja pada setiap pegawai di Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan bisa berkerja lebih efektif dan efesien dengan jumlah pegawai yang ada tersebut sehingga bidang rehabilitas sosial terus mengalami peningkatan dan perubahan untuk mencapai tujuan.

Tabel II.2
Data Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

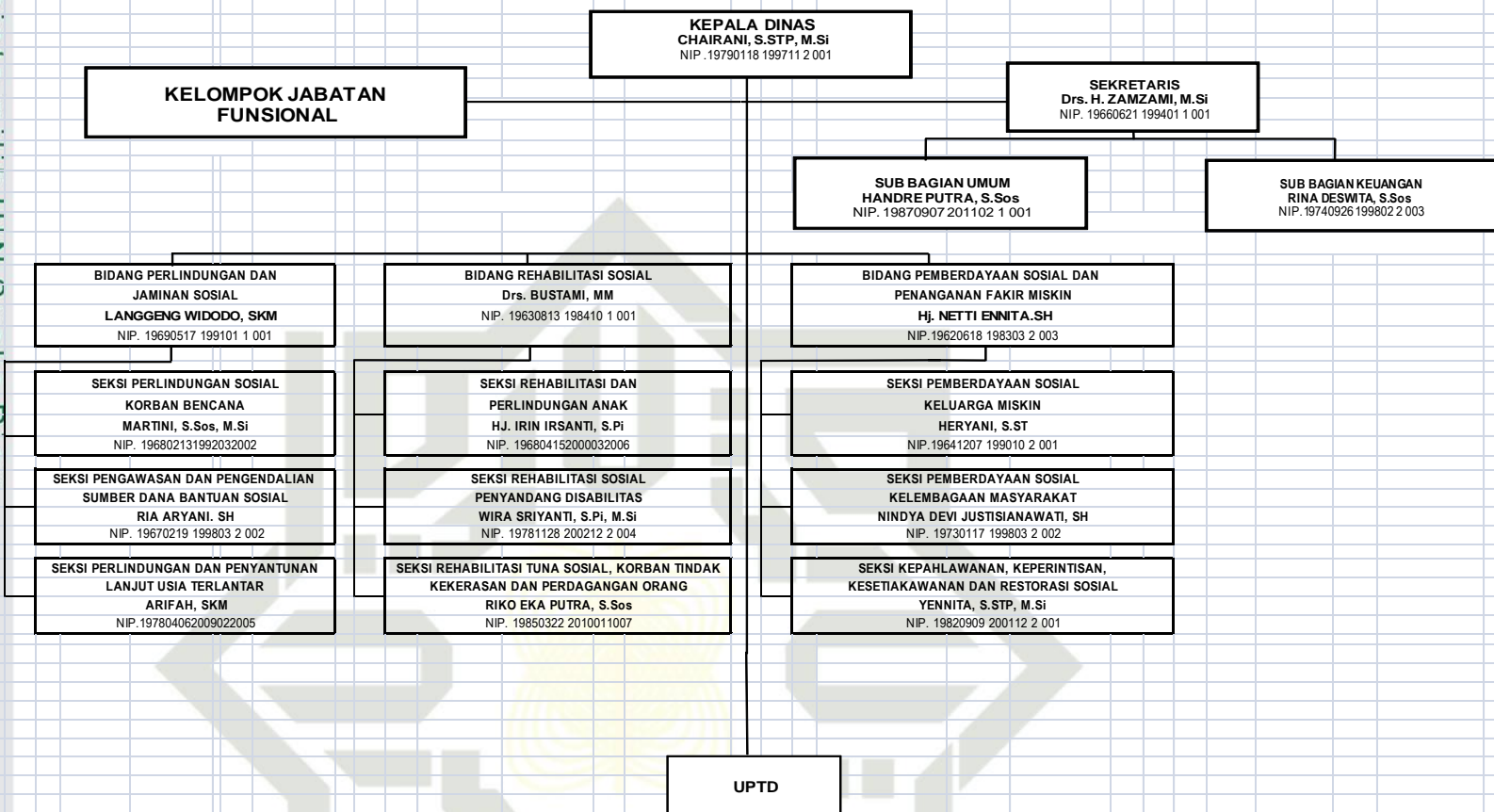
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTA	7
2.	D3	1
3.	S1	15
4.	S2	7
Jumlah		30

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan table diatas dapat terlihat bahwa pada kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru banyak didominasi oleh pegawai yang tingkatan lumayan tinggi yaitu S1 berjumlah 15 orang, tetapi yang berpendidikan SL TA berjumlah 7 orang, berpendidikan D3 berjumlah 1 orang, dan yang berpendidikan S2 berjumlah 7 orang, hal ini harus diperhatikan pengelolaan yang baik.

Bagan Susunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

B. Sejarah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, Makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual.²²

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluru dan komprehensif, antara lain mencakup

²² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Edisi Revisi Penjelasan Umum hlm. 83 diterbitkan oleh Pustaka Mahardika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi ditempat kerja. Penegakan demokrasi ditempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk colonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjol perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.²³

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disahkan Presiden Megawati Seakarnoputri pada

²³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Penjelasan bagian Umum, hal. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 25 Maret 2009. UU 13 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 oleh Sekretaris Negara Jakarta agar setiap orang mengetahui.

UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja,²⁴

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

²⁴ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2003-ketenagakerjaan> diakses pada tanggal 29 maret 2021 pukul 00:54 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.²⁵

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upayah perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

²⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR No.XV11/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakan demokrasi ditempat kerja, penegakan demokrasi ditempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk Sebagian yang merupakan produk colonial, merupakan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:²⁶

- 1) Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 No. 8).
- 2) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);

²⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-Anak dan Orang Muda di Atas Kapal (Staatsblad) Tahun 1926 Nomor 87);
- 4) Ordonansi Tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-Kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
- 5) Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
- 6) Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-Anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
- 7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);
- 8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- 9) Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock-Out) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67); dan
- 10) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
- 11) Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan undang-undang tentang ketenagakerjaan yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih relevan dari peraturan

perundang-undangan yang lama ditampung dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan ini.²⁷

Undang-undang tentang Ketenagakerjaan ini didasarkan pada pentingnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional dalam satu sistem hubungan industrial yang menekankan kemitraan dan kesamaan kepentingan sehingga dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, menciptakan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, memberikan kepastian hukum bagi pekerja, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera, Undang-undang ini antara lain memuat:

- 1) Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
- 2) Kesempatan dan perlakuan sama;
- 3) Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan;
- 4) Pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis antara para pelaku proses produksi;

²⁷Sumber: PusatData hukumonline, 2003, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/hol7552/paling-lambat-27-maret-uu-ketenagakerjaan-berlaku-efektif?page=2>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 22.25 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk peraturan perusahaan, Lembaga Kerjasama Bipartit, serikat pekerja dan organisasi pengusaha, kesepakatan kerja bersama, Lembaga Kerjasama Tripartit, penyuluhan dan pemasyarakatan Hubungan Industrial Pancasila, dan lembaga penyelesaian perselisihan industrial;
- 6) Perlindungan tenaga kerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berorganisasi dan berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus tenaga kerja wanita, anak, orang muda, dan penyandang cacat, serta perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 7) Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan;
- 8) Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang tepat tanpa diskriminasi sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat kemanusiaan;
- 9) Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan tenaga kerja di sektor informal, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja;
- 10) Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁸

²⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

Diantara peraturan perundang-undangan yang lama terdapat beberapa undang- undang mengenai ketenagakerjaan yang isinya belum seluruhnya tertampung dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan ini yang perlu tetap diberlakukan, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
- 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468); dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization).

Disamping itu, peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti.

3. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Menurut Ahli

Ada beberapa pengertian ketenagakerjaan menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Molenaar: Hukum Ketenagakerjaan (*arbeidsrecht*) adalah bagian dari hukum yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga dengan kerja tenaga kerja dan tenaga kerja dengan penguasa.²⁹
- b. Menurut Mr. M.G. Levenbach: Hukum ketenagakerjaan (*arbeidsrecht*) hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan denga keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.³⁰
- c. Menurut Mr N.E.H. Van Esveld: Hukum ketenagakerjaan (*arbeidsrecht*) tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.³¹

²⁹ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

³⁰ Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang University Press, 2008

³¹ Eko Wahyudi,, Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan Pertama, (Jakarta: inar Grafika 2006), h. 4-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

d. Menurut Prof. Iman Soepomo. S.H.: Hukum Perburuan (Ketenagakerjaan) adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang berkerja pada orang lain dengan menerima upah.³²

B. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak:disabilities) yang bearti cacat atau ketidakmampuan.³³

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian belasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan

³² Sendjun H.Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1988, h. 16.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.³⁴

Menurut IG.A.K Wardani anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif.³⁵

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.³⁶

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu :

Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

³⁴ Istifarroh dan Wihi Cahyo Nugroho, *Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swata dan Perusahaan Milik Negara*, Mimbar Keadilan, Vol. 12 No. 1, Juli 2019, h 3

³⁵ Igak Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta, 2008 : Universitas Terbuka.

³⁶ Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, 2006 h.140-152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.³⁷

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.³⁸

C. Konsep Fiqh Siyasah Bagi Penyandang Disabilitas

Fiqh sebagai produk dari ijtihad ulama Islam telah terbentuk menjadi berbagai pembahasan dan ruang lingkup. Salah satu pembahasan yang

³⁷ Tim Independent Rights dan PPRBMYayasanBhaktiLuhur, Hak –Hak Penyandang Disabilitas, cetakan I,Cbm, Malang,2016. h.105

³⁸ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terpenting dan aktual adalah fiqh siyasah. Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan “siyasah” apabila dilihat dari pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim dari Ibnu Aqil didefinisikan sebagai “siyasat” adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syari’at yang umum.

Fiqh siyasah sendiri terbagi beberapa bagian. Salah satu dari bagian yang terpenting adalah siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta lembaga-lembaga yang berada diantaranya.³⁹

Fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaran dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan bagi masyarakat.

Fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaran dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kajian siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu

³⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah altanfidiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah).

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasrī'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan pada apa yang diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.⁴⁰

Dalam buku al-ahkam al-sulthaniyyah, karangan Imam al-mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah yakni siyasah dusturiyyah, siyasah malliyah, siyasah qadlaiyyah, siyasah harbiyyah, siyasah idariyyah.⁴¹ Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah, artinya fiqh siyasah dapat berkembang menyesuaikan masa atau dinamakan dinamis. Dalam menetapkan atau merumuskan kebijakan-kebijakan

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam 2007), hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga umum lainnya.

Fiqh siyasah dapat menjangkau pada masalah penyandang disabilitas dalam pandangan dan pemahaman ajaran islam dengan bersumber dari Al-Qur'an, dan Hadis. Kedudukan fiqh siyasah disini juga merupakan etika moral sosial yang sangat penting dalam memandu kehidupan manusia yang adil, maslahah, manusiawi dan bijaksana untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁴²

Fiqh siyasah mendukung semua upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan penyandang disabilitas. Sebab, ajaran fiqh siyasah sendiri selalu memperhatikan dasar kebaikan atau kemaslahatan dan menghindari suatu kemudharatan yang mungkin timbul.

Di dalam Al-quran surat An-Nissa ayat 58 menjelaskan tentang kaitannya dengan kemaslahatan umat, berikut bunyi ayatnya:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.⁴³

⁴² Ibid., hal. 62

⁴³ Indra Laksana dan Syamsu Arramly, Qur'an Terjemah & Tajwid, (Bandung: Kementerian Agama RI, Surat An-Nissa, ayat 58, hal. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ada juga Hadis Nabi yang berkaitan dengan kepemimpinan yang amanah untuk mengurus rakyatnya. Berikut bunyi Hadist yang artinya:

*“Kewajiban kepala negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada”.*⁴⁴

Makna yang terkandung didalam Hadist Nabi itu adalah bahwa seorang pemimpin harus menjadi pengayom bagi warganya. Seorang pemimpin harus wajib mewujudkan kebaikan di antara warganya dan harus bersikap adil untuk tercapainya kemaslahatan. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk membuat semua warganya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Fasilitas publik seperti bangunan umum dibuat aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Lingkungan sekitar pun juga berperan dalam mendukung terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bangunan umum serta pekerjaan yang aman bagi mereka.

Dalam kaidah Fiqh Siyasah terdapat kaidah yang berkaitan dengan peran dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan kaidah fihiyyah yang menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

⁴⁴ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Baitul Masail PBNU, 2018), hal. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai untuk kemaslahatan rakyat dan mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Karena, pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslaqahatan rakyat. Hal ini tentunya sejalan dengan peran Dinas Sosial untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Dalam tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah tentu saja penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru diperuntukkan kepada penyandang disabilitas agar mendapatkan persamaan derajat, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Meskipun pelaksanaan dari penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tersebut belum sepenuhnya sempurna, namun harus tetap dilaksanakan untuk mensejahterakan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih, yaitu:

مَا لَا يَدْرُكُ كُلُّهُ لَا يَتْرُكُ كُلُّهُ

Artinya : “Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya jika sebuah kebijakan dilaksanakan belum maksimal maka tetap dilaksanakan dan jangan ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan penerapan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi Penyandang Disabilitas meskipun belum dapat sempurna diimplementasikan kepada masyarakat namun harus tetap dilaksanakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dioptimalkan agar terciptanya kesejahteraan bagi umat, khususnya penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Dengan melihat segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Sosial dalam usaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuan dari penyandang disabilitas menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan Siyasah Dusturiyah yaitu kebijakan yang dilakukan oleh penguasa adalah untuk mensejahterakan umatnya.

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Fiqih Siyasah. Karena tugas utama pemimpin adalah mensejahterakan umat sehingga kebijakan yang dibuat untuk kemaslahatan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upaya Dinas Sosial Dalam Menyediakan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah berjalan dengan baik meskipun belum bisa terwujud sepenuhnya. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah berupaya dengan baik untuk membuat program pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas diantara faktor pendukungnya; (i) membuat program pelatihan keterampilan menjahit dan memangkas rambut untuk penyandang disabilitas; (ii) membuat pelatihan mengoperasikan komputer untuk penyandang disabilitas; (iii) memberikan pemasaran terhadap pelatihan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas. Faktor kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas diantaranya; (i) penyandang disabilitas sangat sensitif dan tidak percaya diri sehingga sulit diajak untuk berkomunikasi untuk bekerja; dan (ii) pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas sehingga berpengaruh pada semangat disabilitas dalam mengikuti pelatihan.

Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disabilitas diantaranya; (i) dari pihak penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas sangat sensitif dan tidak percaya diri sehingga sulit diajak untuk berkomunikasi untuk bekerja; dan (ii) pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas sehingga berpengaruh pada semangat disabilitas dalam mengikuti pelatihan.

Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah kebijakan dibuat untuk kemaslahatan umat. Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk meningkatkan kemampuan dari penyandang disabilitas menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan Siyasah Dusturiyah karena penguasa berusaha untuk mensejahterakan umatnya.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut:

1. Bahwa lapangan kerja bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik maka diharapkan kepada Dinas Sosial agar bisa melakukan pemberdayaan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Karena semakin hari penyandang disabilitas semakin meningkat dan mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam dunia kerja.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk mengapresiasi seperti membeli produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas agar mereka semakin semangat dalam bekarya sebagaimana manusia normal.

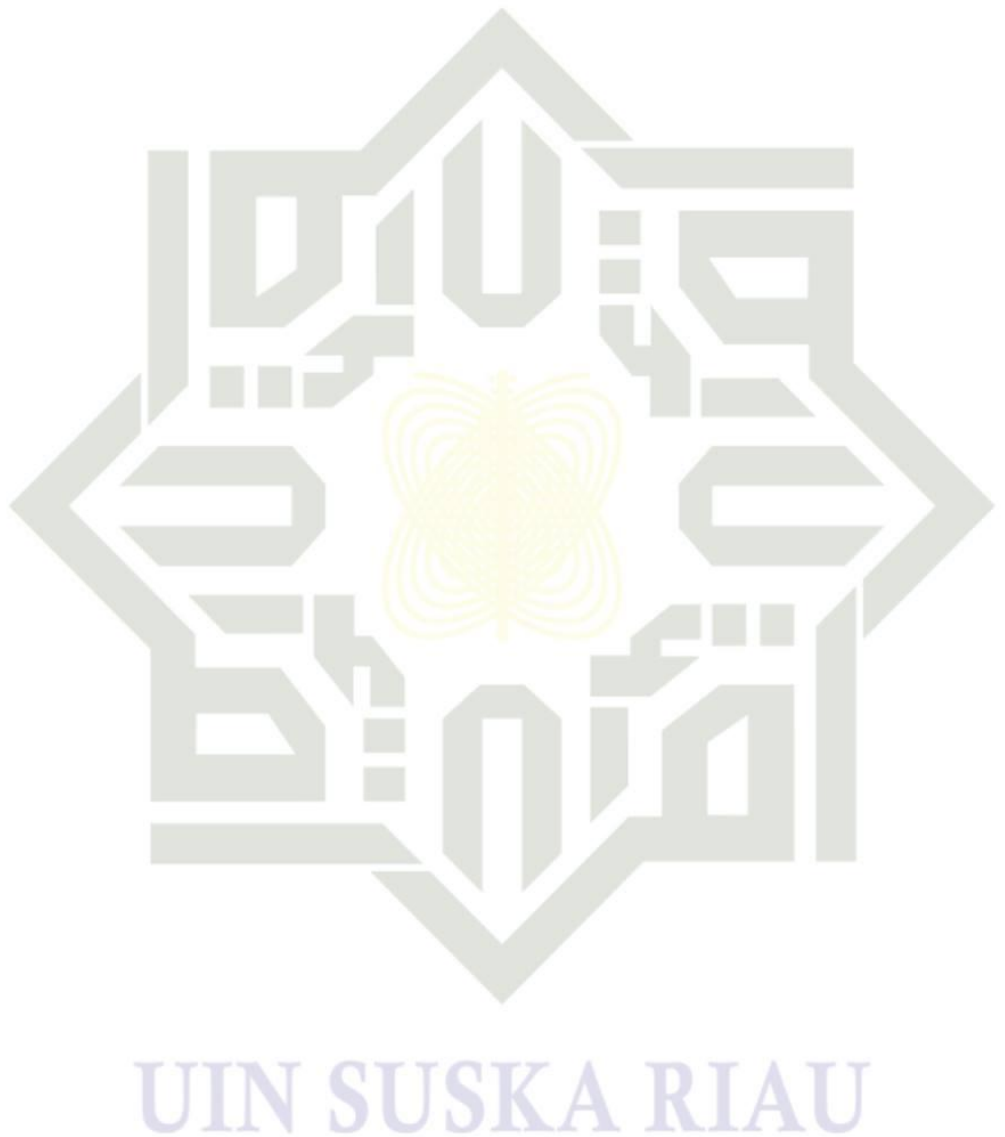
Penulis berharap kepada sarjana hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan dan mengembangkan keterampilan dan menganalisis agar memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat An-Nur ayat 61
- A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana
- Agus Midah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bagir Manan dkk. 2006, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* , Alumni
- Endah Pujiastuti, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press
- Eko Wahyudi, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Irwan Soeharto, 2004, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Igak Wardani, 2008, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Intra Laksana dan Syamsu Arramly, *Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung: Kementerian Agama RI, Surat An-Nissa, ayat 58
- J. Suyuti Pulungun, 1997, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta
- Laila Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Iqbal, 2014, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana
- _____, 2014, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group
- _____, 2007. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruli, H. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan, Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan terkait Lainnya (Kedua)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Said Aqil Siroj, 2018, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU

Sendjun H Manululang, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Citra

Ti Independent Rights dan PPRBM Yayasan BhaktiLuhur, Hak-Hak Penyandang Disabilitas, cetakan I,Cbm, Malang, 2016

Jurnal :

Istifharroh dan Wihi Cahyo Nugroho, 2019, *Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swata Dan Perusahaan Milik Negara*, Mimbar Keadilan, Vol. 12 No. 1

Internet :

Badan Pusat Statistik, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021*, dari <http://pekanbarukota.bps.go.id> diakses, pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 19:45 WIB

Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dari website <https://dinsos.pekanbaru.go.id/profil/sejarah> , diakses pada tanggal 29 Maret 2021 Pukul 20.30 WIB

<https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas> dikutip pada tanggal 12 September 2020, Sabtu, Pukul 11.33 WIB

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2003-kerenagakerjaan> diakses pada tanggal 29 maret 2021 pukul 00:54 WIB

Sumber:PusatDatahukumonline,2003,<https://new.hukumonline.com/berita/baca/h017552/paling-lambat-27-maret-uu-ketenagakerjaan-berlaku-efektif?page=2>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 22.25 WIB

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU MENURUT PANDANGAN Fiqih SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NURUL NABILA**
NIM : **11720425178**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Hertina, M.Pd

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38069
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/II/PP.00.9/1350/2021 Tanggal 21 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : NURUL NABILA I. |
| 2. NIM / KTP | : 11720425178 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGERA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU MENURUT PANDANGAN FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL |

dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Walikota Pekanbaru
Up. Kabankesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/1350/2021

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NURUL NABILA I.
NIM	: 11720425178
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas Sosial

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : Penerapan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketersediaan lapangan
kerja bagi penyandang disabilitas di kota pekanbaru menurut pandangan fiqh siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Sehubungan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. Di larang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nurul Nabila, lahir pada tanggal 14 Mei 1998 di Bangkinang, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Ilyas dan ibu Azimah penulis bertempat tinggal di Dusun Uwai, Desa Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD N 006 Muara Uwai, Bangkinang, pada tahun 2004 dan selesai pada Tahun 2010, setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang dan selesai tahun 2014 Setelah itu saya melanjutkan jenjang SMA N 1 Bangkinang. Dan selesai pada tahun 2017, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Tahun 2017.

Pada Tanggal 06 Agustus 2021, penulis melaksanakan sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi “Penerapan **Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah**” dan dinyatakan lulus dengan Ipa 3,44 berpredikat sangat memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.